

MENCARI HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN MONETER DENGAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Muhammad Yusuf

Abstrak

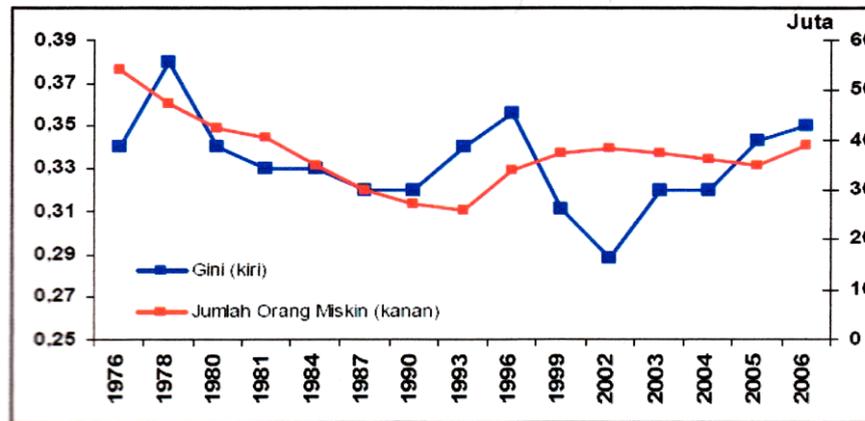
Kemiskinan masih tetap menjadi masalah dunia yang belum terselesaikan. Meskipun jumlah penduduk miskin tidak merata jumlahnya di setiap Negara, namun kemiskinan masih tetap menjadi permasalahan mendasar di sejumlah Negara berkembang dan Negara miskin tentunya. Berbagai langkah kebijakan telah dikeluarkan setiap Negara untuk mengurangi kemiskinan.

Kemiskinan itu sendiri berakar dari besarnya jumlah angka pengangguran. Di Indonesia kemiskinan sangat terlihat di daerah yang miskin sumber daya alam serta jumlah penduduk yang besar dalam suatu daerah. Pengendalian moneter dan inflasi menjadi salah satu langkah yang di ambil pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Mempertahankan daya beli masyarakat menjadi tolak ukur utama dalam mengurangi angka kemiskinan. Di dalam penelitian ini akan diteliti efektifitas kebijakan moneter itu sendiri dalam mengurangi angka kemiskinan.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi masalah ekonomi global yang belum terselesaikan hingga saat ini, terutama di negara-negara berkembang. Di Indonesia, jumlah orang miskin tidak banyak berkurang dalam tiga puluh tahun terakhir, dari sekitar 50 juta jiwa di tahun 1976 menjadi 40 jiwa di tahun 2006, seperti dapat dilihat pada grafik 1. Dalam kurun waktu tersebut, jelas sekali bahwa pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi kemiskinan ini diperburuk dengan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan, paling tidak sejak 2002, saat Indonesia mulai mencoba menggeliat keluar dari krisis. Akselerasi pembangunan pasca krisis dipandang belum menyentuh golongan bawah. Oleh karena itu tak pelak lagi bahwa kemiskinan, bersama dengan distribusi pendapatan, merupakan fokus perhatian semua pihak, untuk semua tingkat strata masyarakat.



Grafik 1: Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Diantara banyak kebijakan yang diambil, kebijakan moneter diakui sebagai sebuah instrumen modern yang ampuh untuk mengelola ekonomi. Dinamika kebijakan suku bunga bank central, turut menentukan kondisi perekonomian nasional. Karena posisi kebijakan moneter memiliki peran strategis, hal ini menjadi menarik sekaligus penting untuk mengetahui hubungannya dengan permasalahan kemiskinan.

Persoalan inilah yang coba diteliti dalam kesempatan ini. Secara spesifik, kajian ini mencoba membedah pengaruh kebijakan moneter terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, baik dalam kaitannya dengan siklus bisnis (*business cycle*) maupun dalam jangka waktu yang lebih panjang dengan melibatkan data provinsi di Indonesia.

Berbagai kajian mengenai kebijakan moneter dan kemiskinan hampir selalu berfokus pada perspektif jangka pendek. Serta sebagai bagian dari keseluruhan kebijakan ekonomi makro pada sisi permintaan (*demand-side policy*). Kebijakan moneter dalam batas tertentu memang mungkin menstabilkan siklus bisnis melalui pengaruhnya pada variabel output, pengangguran, dan inflasi dalam jangka pendek. Artinya, jika tingkat kemiskinan bereaksi terhadap variabel-variabel tersebut, kebijakan moneter dapat diarahkan untuk mempengaruhi kemakmuran golongan miskin. Disamping itu, karena inflasi dapat mengubah distribusi asset dari kreditur ke debitur, kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.

Estimasi perilaku siklikal (*cyclical behaviour*) kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan akan turun jika pengangguran turun. Turunnya pengangguran ini diyakini bisa dicapai dengan

melaksanakan kebijakan suku bunga rendah. Namun tidak ditemukan bukti adanya efek dari tingkat pengangguran terhadap distribusi pendapatan. Lebih lanjut, didapat hasil bahwa naiknya inflasi (juga sebagai dampak kebijakan moneter longgar) akan menurunkan tingkat kemiskinan, sedangkan dampak inflasi terhadap tingkat ketimpangan pendapatan tidak dapat dideteksi.

Dengan menggunakan data regional ke-26 provinsi di Indonesia, ditemukan hubungan negatif penting antara tingkat kemiskinan dengan inflasi rata-rata dan instabilitas ekonomi makro. Hubungan ini secara kuantitatif besar dan secara statistik signifikan. Hasil ini jelas konsisten dengan pemahaman bahwa dalam jangka panjang pengendalian inflasi dan variabilitas output melalui kebijakan moneter yang berhati-hati akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi mereka yang berada di bagian bawah distribusi pendapatan. Inflasi yang rendah dan ekonomi makro yang stabil merupakan prakondisi penting bagi usaha-usaha untuk menggerakkan sisi penawaran dalam perekonomian (*supply-side policy*). Bergeraknya sisi penawaran memiliki sifat yang tidak inflatoir sehingga turut berkontribusi pada rendahnya inflasi dan stabilnya ekonomi makro di periode berikutnya.

Selanjutnya, dengan membagi ke-26 provinsi yang dimiliki menjadi subsampel provinsi ber-PDRB tinggi dan subsampel provinsi ber-PDRB rendah, diperoleh hasil yang mempertajam temuan di atas. Pengaruh inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan di provinsi-provinsi ber-PDRB kecil lebih besar dibandingkan pengaruh sejenis di seluruh provinsi. Hasil lain yang mengejutkan adalah tidak ditemukannya pengaruh inflasi jangka panjang maupun instabilitas ekonomi makro terhadap tingkat kemakmuran di provinsi-provinsi ber-PDRB besar.

Disamping itu inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi mikro berpengaruh lebih besar terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi ber-PDRB kecil dibanding pengaruh yang sama dalam Skala nasional. Hubungan ini ternyata juga tidak ditemukan di provinsi-provinsi ber-PDRB besar. Temuan ini menunjukkan adanya kerentanan provinsi-provinsi kecil terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan terhadap inflasi maupun terhadap instabilitas. Kerentanan ini bisa disebabkan oleh tiga hal. Pertama adalah struktur ekonomi yang lebih kaku, misalnya karena dominannya sektor pertanian dimana pendapatan masyarakat sangat sensitif terhadap gejolak harga produk pertanian. Kedua adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (*human capital*) sehingga mobilitas masyarakat baik antar

sektor maupun antar daerah sangat terbatas. Ketiga, golongan miskin biasanya memperoleh pendapatan yang dihitung secara nominal tanpa mekanisme indeksasi sehingga sama sekali tidak terlindung dari efek negatif inflasi. Kebijakan moneter yang berhati-hati akan meningkatkan insentif investasi sehingga akan menggerakkan penawaran agregat (*aggregate supply*) yang pada gilirannya akan lebih menurunkan inflasi dan menumbuhkan investasi di periode berikutnya.

Pemeriksaan kekuatan hasil (*robustness check*) dilakukan dengan membagi data 26 provinsi yang dimiliki menjadi beberapa subsampel berdasarkan pulau. Pembagian ini menggambarkan variasi regional yang erat kaitannya dengan karakteristik infrastruktur dan struktur ekonomi di tiap daerah. Hasil analisis yang diperoleh tidak berubah, yaitu semakin tinggi inflasi jangka panjang di suatu provinsi, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di provinsi tersebut, dan semakin tinggi instabilitas ekonomi makro di suatu provinsi, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan provinsi tersebut. Selain itu, ditemukan bahwa untuk tingkat inflasi atau level stabilitas ekonomi makro yang sama, provinsi-provinsi di Maluku, Nusa Tenggara dan Irian Jaya memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi sedangkan provinsi-provinsi di Jawa dan Kalimantan adalah yang paling rendah tingkat kemiskinannya. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter yang berhati-hati (*prudent*) adalah kebijakan moneter yang berpihak pada si miskin (*propoor*).

Kemiskinan merupakan masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan dapat berupa kelaparan. Kemiskinan berarti ketiadaan rumah, tidak memiliki fasilitas berobat, tidak mendapatkan pendidikan, tidak punya pekerjaan, khawatir tentang masa depan dan hidup hanya untuk hari ini. Dengan kata lain, kemiskinan memiliki banyak wajah, berubah dari waktu ke waktu dan dapat dipaparkan dengan berbagai cara. Tetapi yang sudah pasti "*poverty is a situation people want to escape*".

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensional, yang memiliki hubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Seringkali pemikiran mengenai kemiskinan lebih banyak menekankan pada segi-segi emosional atau perasaan yang diselimuti oleh aspek moral dan kemanusiaan, ataupun masih bersifat partisan karena bersangkut paut

dengan alokasi sumber daya, sehingga usaha memahami hakekat kemiskinan itu sendiri menjadi kabur.

Masalah kemiskinan yang dihadapi masyarakat terdiri dari:

1. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan kemajuan.
2. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh pemiskinan sumberdaya alam yang dapat digunakan untuk menghidupi masyarakat.
3. Kemiskinan absolut struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakterpenuhinya kebutuhan hidup standar minimum suatu komunitas.
4. Kemiskinan relative adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan kemajuan.

Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah: (a) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal; (b) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana; (c) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor; (d) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung; (e) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern); (f) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat, (g) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya; (h) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*), (i) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Pendapatan penduduk tidak selalu merata, bahkan yang sering terjadi justru sebaliknya. Manakala pendapatan terbagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata, sebaliknya apabila pendapatan regional tersebut terbagi secara tidak merata (ada yang kecil, sedang dan besar) dikatakan ada ketimpangan dalam pendapatannya. Semakin besar perbedaan pembagian pendapatan regional tersebut berarti semakin besar pula ketimpangan pendapatan. Terdapat berbagai ukuran kesenjangan regional mulai dari yang paling sederhana hingga paling rumit.

Kebijakan moneter yang ekspansif merupakan kebijakan yang terkait siklus bisnis yang berjangka pendek, sehingga kemiskinan juga sering dikatakan memiliki siklus jangka pendek. Siklus jangka pendek dari kemiskinan tersebut membuat sejumlah pihak berkesimpulan bahwa kebijakan moneter yang dapat mengentaskan kemiskinan adalah kebijakan moneter

yang longgar (*ekspansif*). Namun perlu disadari bahwa opini ini telah mengabaikan fakta penting bahwa efek siklikal kebijakan moneter longgar terhadap pengangguran pada dasarnya bersifat temporer. Kebijakan moneter longgar hanya dapat menghasilkan boom sementara, sehingga kemiskinan hanya berkurang sementara saja.

Pada saat pengangguran telah mencapai tingkat tertentu, kemiskinan akan meningkat kembali. Di lain pihak, kebijakan moneter ekspansif secara alami akan meningkatkan inflasi. Jika di periode berikutnya kebijakan moneter yang ketat (*kontraktif*) digunakan untuk menurunkan inflasi tersebut, maka akan timbul efek merugikan terhadap kemiskinan yang akan menghilangkan penurunan kemiskinan sementara yang terjadi di periode boom sebelumnya. Di banyak situasi usaha disinflasi tersebut justru akan menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan sebelum diberlakukannya kebijakan moneter longgar pada periode sebelumnya.

Dalam jangka panjang, kebijakan moneter umumnya secara langsung mempengaruhi inflasi rata-rata (inflasi jangka panjang) dan fluktuasi permintaan agregat (stabilisasi ekonomi makro). Oleh karena itu, pertanyaan yang penting dari perspektif pengambil kebijakan moneter adalah apakah terdapat hubungan antara inflasi jangka panjang dan stabilitas ekonomi makro dengan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Saat ini terdapat konsensus global dimana para otoritas moneter di dunia menempatkan pencapaian stabilitas harga sebagai prioritas. Implikasinya hampir semua kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai inflasi yang rendah dan situasi ekonomi makro yang stabil. Oleh karena itu menjadi wajar apabila kinerja (*performance*) dari kebijakan moneter direpresentasikan dengan seberapa besar tingkat inflasi dan tingkat stabilitas ekonomi makro.

Berbagai penelitian yang mengkaji kemungkinan hubungan antara kebijakan moneter dan investasi, output maupun kemiskinan umumnya mengukur kebijakan moneter bukan dalam bentuk parameter operasional kebijakan moneter, seperti pertumbuhan jumlah uang beredar atau kenaikan suku bunga, namun dalam bentuk besaran kinerja kebijakan moneter (*monetary policy performance*) seperti inflasi, stabilitas ekonomi makro atau pengangguran. Penelitian ini mengikuti konvensi tersebut dengan menghitung sejumlah ukuran kinerja kebijakan moneter, untuk

kemudian dicari bagaimana pengaruhnya, bila ada, terhadap tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan di Indonesia.

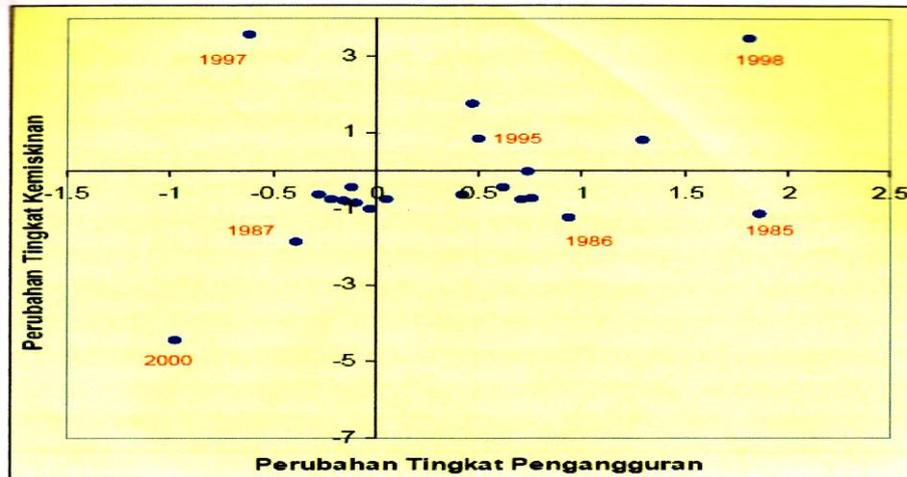
Secara teoritis kebijakan moneter longgar (*ekspansif*) akan menurunkan pengangguran, meningkatkan output dan meningkatkan inflasi dalam jangka pendek. Namun diyakini pula bahwa dampak kebijakan ekspansif ini hanya bersifat sementara karena adanya fluktuasi business cycle dan tidak disukainya inflasi yang tinggi. Sehingga kebijakan moneter ini tidak dapat menghasilkan boom permanen. Di lain pihak, kebijakan moneter yang berhati-hati, konsisten dan kredibel adalah kebijakan yang dapat mengendalikan inflasi dalam jangka panjang dan menstabilkan fluktuasi permintaan agregat. Rendahnya inflasi dalam jangka panjang serta stabilnya ekonomi makro merupakan situasi positif yang mendorong investasi sehingga dipercaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan memperbaiki distribusi pendapatan, sehingga kesejahteraan orang miskin dapat meningkat secara permanen.

Pembahasan

Analisis Jangka Pendek

Dalam jangka pendek secara umum terlihat kecenderungan adanya hubungan positif antara perubahan tingkat pengangguran nasional dan perubahan tingkat kemiskinan nasional, seperti tercermin pada grafik 2. Dalam dua puluh tahun terakhir, mayoritas dari hubungan tersebut tampak terletak di kuadran satu dan tiga, yang masing masing berasosiasi dengan peningkatan pengangguran yang diikuti naiknya tingkat kemiskinan, dan penurunan pengangguran yang diikuti turunnya pula tingkat kemiskinan. Kedua jenis hubungan tersebut merupakan gambaran business cycle di perekonomian nasional. Dilain pihak, hubungan perubahan inflasi jangka pendek dengan perubahan tingkat kemiskinan dalam grafik 3 terlihat kurang jelas. Hal ini sebagian karena adanya observasi outliers pada tahun 1997, 1998 dan 1999. Di tahun 1997, inflasi yang naik diiringi dengan tingkat kemiskinan yang meningkat tajam yang menunjukkan terjadinya awal suatu krisis. Pada 1998 inflasi meroket dan dibarengi juga dengan meningkatnya kembali tingkat kemiskinan secara substansial. Baru di tahun 1999 tampak adanya penurunan inflasi cukup besar yang diiringi penurunan tingkat kemiskinan, sebagai tanda berakhirnya krisis. Meskipun demikian, pengamatan yang jeli akan menuntun kita melihat bahwa mayoritas observasi ada di kuadran dua, yang berasosiasi dengan meningkatnya inflasi

(yang kemungkinan besar adalah dampak kebijakan permintaan yang ekspansif) yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan.



Grafik 2: Dinamika Hubungan Perubahan Pengangguran dan Perubahan Kemiskinan Nasional

Note:**Signifikan di 5% *Signifikan di 10% Variabel dependen adalah perubahan tingkat kemiskinan Ketiga angka pada tiap variabel beturut-turut adalah koefisien estimasi, nilai absolut t-statistik, dan p-value.

Untuk memberi gambaran yang lebih akurat mengenai pola yang diteliti dilakukan analisis dengan teknik regresi yang mengacu pada (1), (2) dan (3). Hasil analisis ditampilkan pada tabel 1 dan 2. Data 1997, 1998 dan 1999 yang memiliki karakteristik berbeda diperhitungkan secara spesial. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa dalam jangka pendek (satu tahun) terdapat hubungan positif yang signifikan antara perubahan tingkat pengangguran dan perubahan tingkat kemiskinan. Dengan koefisien estimasi yang hampir satu (0.992), terlihat adanya one-to-one mapping antara penurunan pengangguran (misalnya sebagai dampak kebijakan moneter yang longgar) dengan membaiknya tingkat kemiskinan. Ekonomi yang membaik sebagai dampak suatu kebijakan ekspansif yang ditandai dengan menurunnya jumlah orang tanpa pekerjaan dalam jangka pendek berasosiasi dengan semakin sedikitnya orang miskin. Di sisi lain, tingkat inflasi menunjukkan hubungan yang negatif (-0.130) dengan tingkat kemiskinan. Inflasi yang meningkat sebagai akibat kebijakan moneter yang longgar akan mendorong permintaan agregat yang berperan positif menurunkan tingkat kemiskinan.

Kedua penemuan di atas sesuai dengan teori yang chterina banyak khalayak, dimana kebijakan moneter yang ekspansif (*kontraktif*) menaikkan (menurunkan) aktivitas ekonomi. Namun secara alamiah, salah satu dari dua kebijakan tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara terus menerus,

karena terdapatnya fluktuasi siklus bisnis (*business cycle*) dalam ekonomi makro. Kondisi ini terlihat dari terdapatnya dua kelompok besar observasi pada gambar 1, masing-masing di kuadran 1(*boom*) dan 3 (*recession*).

Lebih jauh lagi, dampak kebijakan moneter longgar berupa inflasi yang tinggi hampir selalu tidak disukai. Inflasi yang terlalu tinggi cenderung menyebabkan ketidakstabilan, suatu hal tidak menyenangkan baik bagi pelaku bisnis maupun rumah tangga. Inflasi yang meningkat pada suatu saat umumnya akan direspon dengan kebijakan disinflasi, yang tentu saja akan membalikkan atau efek penurunan kemiskinan yang telah dicapai di periode sebelumnya. Bahkan bisa terjadi kebijakan disinflasi justru menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dari kondisi sebelum kebijakan moneter yang longgar diberlakukan.

Selanjutnya, hubungan antara aktivitas ekonomi (tercermin dari inflasi dan tingkat pengangguran) dan distribusi pendapatan, sebagai tolok ukur lain kesejahteraan orang miskin, dipresentasikan pada tabel 2. Terlihat bahwa dalam jangka pendek tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perubahan tingkat pengangguran dan tingkat ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain inflasi jangka pendek tidak berasosiasi dengan tingkat ketimpangan pendapatan. Kebijakan moneter yang ekspansif dalam jangka pendek dapat menurunkan tingkat kemiskinan (walaupun tidak secara permanen) namun tidak memperbaiki tingkat ketimpangan pendapatan.

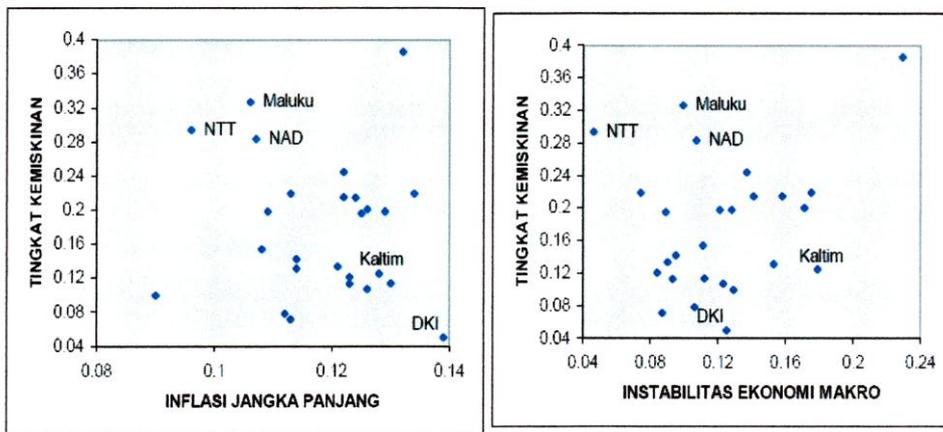
Tabel 2: Perubahan Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan Ekonomi Makro

PERUBAHAN TINGKAT KEMISKINAN & EKONOMI MAKRO			
	MODEL 1	MODEL 2	MODEL 3
C	-0.922	-0.551	-0.808
	-3.024	-1.896	-2.494
	0.009	0.077	0.026
PERUBAHAN TINGKAT	0.992**		0.744
PENGANGGURAN	2.378	0.992	1.545
	0.031		0.145
PERUBAHAN TINGKAT INFLASI		-0.130*	-0.074
		-1.990	-1.021
		0.065	0.325
1997	5.117**	4.815**	5.235**
	4.144	3.813	4.227
	0.001	0.002	0.001
1998	2.602*	12.803**	7.918
	1.954	2.818	1.474
	0.070	0.013	0.163
1999	-0.036	-10.302*	-5.759
	-0.031	-2.005	-1.005
	0.976	0.063	0.332
R²	0.666	0.636	0.689
S.E.E	1.141	1.191	1.139

Note: Signifikan di 5% *Sigdfikan di 10% Variabel dependen adalah perubahan koefisien Gini Ketiga angka pada tiap variabel berturut-turut adalah koefisien estimasi, nilai absolut t-Statistik dan p-value.

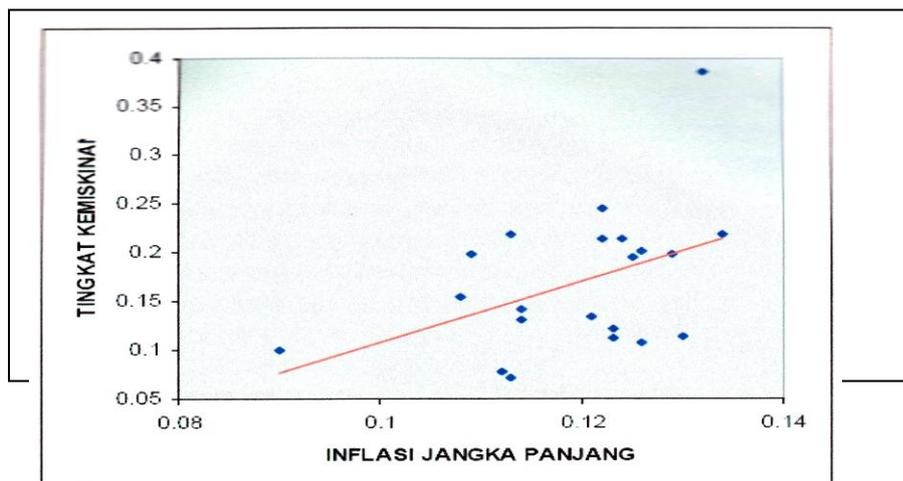
Analisis jangka Panjang

Grafik 4 menampilkan *scatter plot* dari tingkat kemiskinan terhadap inflasi jangka panjang dan terhadap variabilitas permintaan. Dari ke-26 provinsi yang ada, terlihat adanya beberapa provinsi yang memiliki karakteristik berbeda (outliers). Provinsi-provinsi tersebut adalah NAD dan Maluku, yang merupakan daerah dimana konflik pernah/sedang berlangsung. Disamping itu terdapat juga provinsi DKI, Kaltim dan NTT yang merupakan daerah dengan kekhususan sumber daya (adowment). DKI dan Kaltim memiliki sumber daya berlimpah sedang NTT sangat minim.

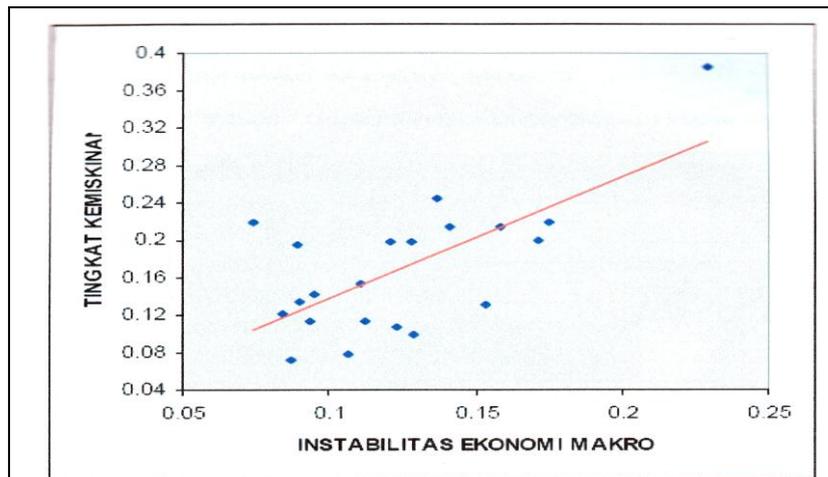


Grafik 4: Inflasi jangka Panjang, Instabilitas Ekonomi Makro dan Tingkat kemiskinan

Dalam estimasi regresi yang dilakukan, didefinisikan lima dummy yang masing-masing berasosiasi dengan tiap provinsi outlier tersebut. Grafik 5 dan 6 menggambarkan hubungan kemiskinan dan inflasi jangka panjang serta hubungan kemiskinan dan variabilitas permintaan, tanpa outliers. Tingkat kemiskinan provinsi yang dipakai adalah pada tahun 2005, inflasi jangka panjang di tiap provinsi didekati dengan inflasi rata-rata provinsi tersebut dalam kurun waktu 1984-2004, sedangkan variabilitas permintaan (instabilitas ekonomi makro) provinsi merupakan standard deviasi dan pertumbuhan PDB nominal provinsi tersebut dalam kurun waktu yang sama..



Grafik 5: inflasi Jangka Panjang



Grafik 6: Kemiskinan dan Instabilitas Ekonomi Makro

Secara grafis terlihat indikasi adanya hubungan positif antara inflasi jangka panjang dan tingkat kemiskinan. Provinsi yang mampu menstabilkan inflasi pada tingkat yang rendah dalam waktu lama cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang juga rendah. Sebaliknya daerah dengan laju kenaikan harga yang tinggi dalam jangka panjang tampaknya memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Hubungan positif juga ditemukan antara tingkat instabilitas ekonomi makro dan tingkat kemiskinan. Wilayah yang pertumbuhan ekonominya lebih stabil secara rata-rata akan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari wilayah dengan tingkat pertumbuhan yang lebih fluktuatif. Kedua kemungkinan hubungan positif tersebut secara lebih detil diselidiki dengan analisis regresi yang menggunakan spesifikasi (4), (5) dan (6) dan hasilnya ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 3 - Tingkat Kemiskinan dan Ekonomi Makro

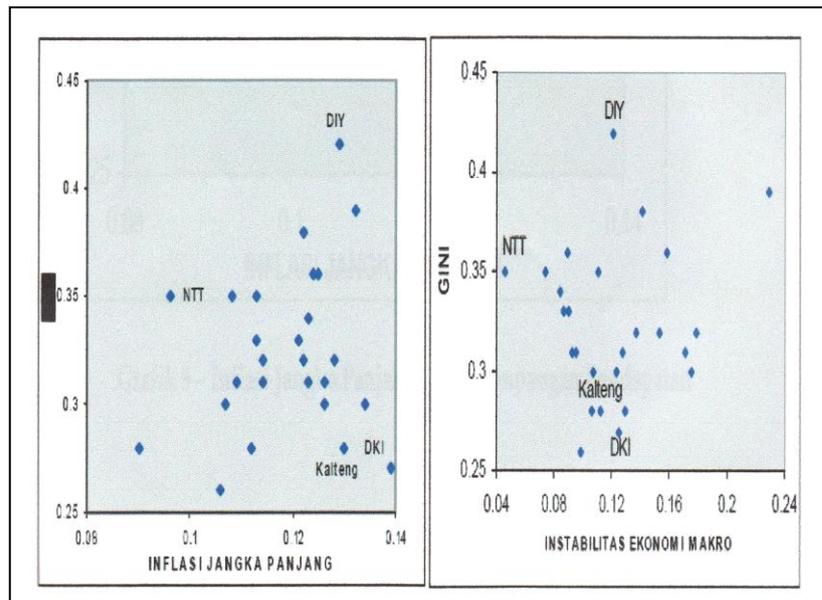
TINGKAT KEMISKINAN & EKONOMI MAKRO			
	MODEL 1	MODEL 2	MODEL 3
C	-0.205	0.009	-0.174
	-1.166	0.213	-1.239
	0.258	0.833	0.231
INFLASI JANGKA PANJANG	3.132**		1.691
	2.139		1.360
	0.046		0.191
INSTABILITAS EKONOMI MAKRO		1.295**	1.141**
		4.039	3.426
		0.001	0.003
NAD	0.153**	0.136**	0.155**
	2.177	2.441	2.750
	0.042	0.025	0.013
MALUKU	0.200**	0.190**	0.209**
	2.823	3.386	3.689
	0.011	0.003	0.002
DKI JAKARTA	-0.180**	-0.120*	-0.153**
	-2.442	-2.163	-2.573
	0.025	0.044	0.019
KALTIM	-0.071	-0.116**	-0.122**
	-1.029	-1.985	-2.127
	0.317	0.062	0.048
NTT	0.198**	0.226**	0.253**
	2.602	3.705	4.023
	0.018	0.002	0.001
R²	0.511	0.674	0.704
Adj. R²	0.357	0.570	0.589
S.E.E	0.066	0.054	0.053

Note. **Signifikan di 5% *Signifikan di 10% Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan tahun 2005 Ketiga angka pada tiap variabel berturut-turut adalah koefisien estimasi, nilai absolut t-statistik, dan p-value.

Tampak dari tabel 3 bahwa inflasi jangka panjang yang tinggi berasosiasi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, sementara kondisi ekonomi makro yang tidak stabil juga berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Kedua hubungan di atas secara ekonomi dan statistik sangat signifikan, kecuali saat kedua variabel, inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro diikutsertakan bersama-sama. Pada situasi ini, pengaruh inflasi jangka panjang terhadap tingkat kemiskinan secara statistik menjadi tidak signifikan. Di sisi lain, penggunaan dummy untuk data outliers dikuadran oleh hasil estimasi koefisien dummy yang hampir semuanya signifikan.

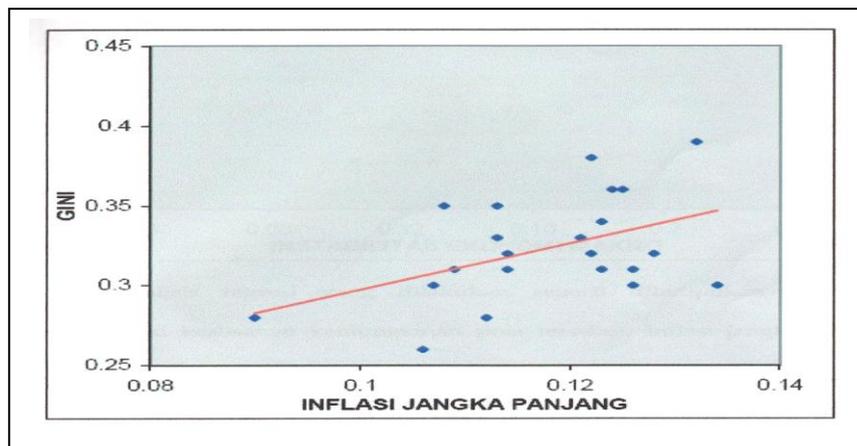
Hasil yang juga menarik adalah untuk tingkat inflasi dan tingkat instabilitas ekonomi makro yang sama, tingkat kemiskinan provinsi NAD, Maluku dan NTT (daerah konflik atau bersumber-daya sangat rendah) lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sedangkan tingkat kemiskinan provinsi DKI dan Kaltim (daerah bersumber-daya sangat tinggi) lebih rendah dari rata-rata nasional. Dari hasil ini terlihat bahwa daerah-daerah dengan situasi tidak kondusif atau memiliki kapasitas rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di wilayah yang kondusif atau memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. Implikasinya, untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang utamanya terjadi di daerah-daerah kurang maju, kebijakan moneter di tiap daerah tersebut idealnya diarahkan untuk menekan inflasi secara konsisten dalam jangka panjang.

Selanjutnya dilakukan analisis mengenai dampak inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di berbagai daerah di Indonesia. Pada grafik 7 ditunjukkan scatter plot data regional yang menggambarkan hubungan antara koefisien Gini dengan inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro. Dan kedua gambar tersebut terlihat bahwa beberapa provinsi memiliki karakteristik khusus (outliers), yaitu DIY (koefisien Gini tertinggi), Kalteng (kombinasi inflasi tinggi dan koefisien Gini tinggi), NTT (endowment sangat rendah) dan DKI (endowment sangat tinggi). 4 Robustness check yang dilakukan dengan memakai ukuran tingkat kemiskinan alternatif, yaitu proporsi penduduk dengan jumlah pengeluaran per bulan di bawah Rp.150.000,- pada tahun 2005, menghasilkan temuan yang secara kualitatif sama.

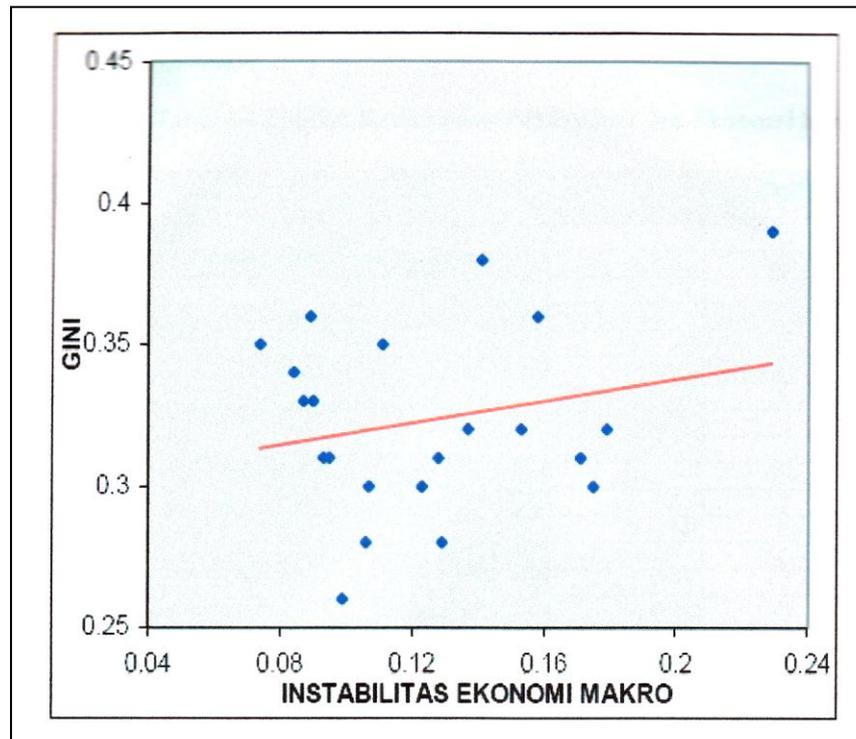


Grafik 7: Inflasi jangka Panjang, Instabilitas Ekonomi Makro dan Ketimpangan pendapatan

Grafik 8 dan 9 menunjukkan keteraturan penyebaran hubungan antara inflasi rata-rata dan ketimpangan pendapatan serta antara variabilitas permintaan dan ketimpangan pendapatan. Terlihat adanya indikasi hubungan positif antara inflasi jangka panjang dan tingkat ketimpangan pendapatan serta antara instabilitas ekonomi makro dan ketimpangan pendapatan.



Grafik 8: Inflasi jangka Panjang dan Ketimpangan pendapatan



Analisis regresi yang dilakukan seperti ditampilkan dalam tabel 4 menyelidiki keabsahan kemungkinan pola tersebut. Inflasi jangka panjang yang tinggi secara signifikan berasosiasi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi. Kondisi ekonomi makro yang tidak stabil juga berpengaruh negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, namun secara statistik tidak signifikan. Penggunaan dummy untuk data outliers dikuatkan oleh hasil estimasi koefisien dummy yang hampir semuanya signifikan mengacu pada Model 1, untuk inflasi dan instabilitas ekonomi makro yang sama, tingkat ketimpangan pendapatan provinsi DIY dan NTT lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sedangkan provinsi DKI dan Kalteng memiliki tingkat ketimpangan pendapatan lebih rendah dari rata-rata nasional.

Tabel 4 : Tingkat Ketimpangan Pendapatan Dan Ekonomi Makro

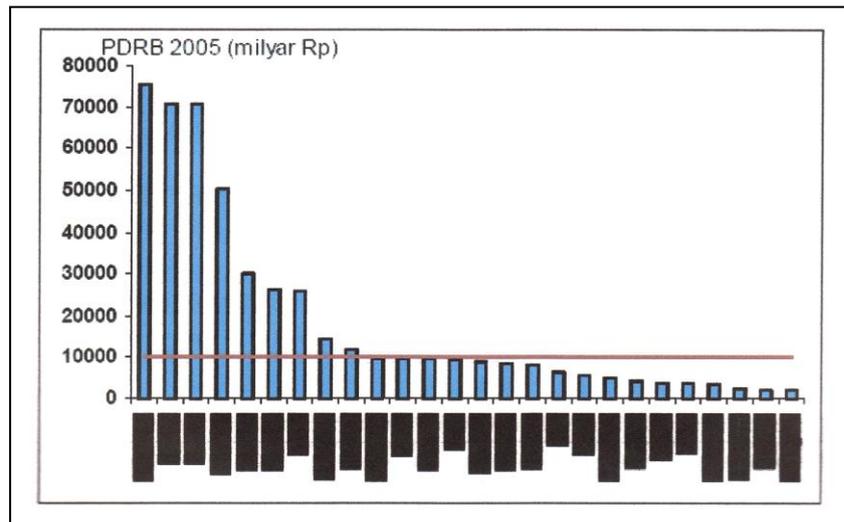
TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN & EKONOMI MAKRO			
	MODEL 1	MODEL 2	MODEL 3
C	0.152	0.299	0.154
	2.032	12.640	1.974
	0.056	0.000	0.063
INFLASI JANGKA PANJANG	1.454**		1.404*
	2.299		1.932
	0.032		0.068
INSTABILITAS MAKRO EKONOMI		0.194	0.029
		1.076	0.151
		0.295	0.882
DIY	0.081**	0.098*	0.081**
	2.585	2.943	2.518
	0.018	0.008	0.021
DKI	-0.084**	-0.053	-0.083*
	-2.531	-1.601	-2.387
	0.020	0.125	0.028
KALTENG	-0.061*	-0.041	-0.060**
	-1.945	-1.220	-1.828
	0.066	0.237	0.083
NTT	0.059*	0.042	0.060
	1.756	1.169	1.702
	0.094	0.256	0.105
R²	0.524	0.431	0.525
Adj. R²	0.405	0.289	0.375
S.E.E	0.030	0.032	0.030

Note: ** Signifikan di 5% *Signifikan di 10% Variabel dependen adalah koefisien Gini tahun 2005 Ketiga angka pada tiap variabel berturut-turut adalah koefisien estimasi nilai absolut t-stabstik, dan p-value.

Berdasarkan temuan dalam analisis jangka panjang diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter yang menjaga stabilitas ekonomi makro secara signifikan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan sedangkan kebijakan moneter yang secara konsisten menghasilkan inflasi rendah dalam jangka panjang berasosiasi, juga secara signifikan, dengan membaiknya distribusi pendapatan di masyarakat (tingkat kesenjangan menurun).

Efek Asimetris Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Kemiskinan

Untuk menyelidiki kemungkinan efek asimetris secara regional dari inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro, selanjutnya didefinisikan dua subsample berdasarkan besarnya ukuran perekonomian masing-masing provinsi. Secara lebih spesifik, kedua subsample tersebut didefinisikan sesuai nilai PDRB pada 2005, dimana subsample 1 adalah provinsi dengan PDRB di bawah Rp 10 Triliun dan subsample 2 adalah provinsi dengan PDRB di atas Rp 10 Triliun. Gambaran kedua subsample tersebut tampak pada grafik 10. Selanjutnya dilakukan analisis regresi dengan spesifikasi (4) dan (5).



Grafik 10: Inflasi jangka Panjang dan Ketimpangan pendapatan

Tabel 5: Tingkat Kemiskinan dan Ekonomi Makro - Subsampel ber-PDRB < 10 Trilyun

TINGKAT KEMISKINAN & EKONOMI MAKRO		
SUB SAMPLE 1		
	MODEL 1	MODEL 2
C	-0.488	-0.019
	-1.453	-0.348
	0.172	0.734
INFLASI JANGKA PANJANG	5.435*	
	1.979	
	0.071	
INSTABILITAS EKONOMI MAKRO		1.507**
		3.751
		0.003
NAD	0.190*	0.141**
	2.133	2.268
	0.054	0.043
MALUKU	0.238**	0.197**
	2.644	3.133
	0.021	0.009
NTT	0.260**	0.243*
	2.445	3.479
	0.031	0.005
R²	0.475	0.680
Adj. R²	0.300	0.573
S.E.E	0.076	0.059

Note. **Signifikan di 5% *Signifikan di 10%

1. Variabel dependen adalah tingkat kemiskman tahun 2005
2. Ketiga angka pada tiap variabel berturut-turut adalah koefisien estimasi, nilai absolut t-statistic, dan p-value

- Subs sampel ber-PDRB kecil berisi provinsi-provinsi:

Tabel 6: Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan Ekonomi Makro - Subs sampel ber PDRB < 10 Trilyun

TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN & EKONOMI MAKRO		
SUB SAMPLE 1		
	MODEL 1	MODEL 2
C	0.090	0.267
	0.696	9.098
	0.500	0.000
INFLASI JANGKA PANJANG ✓	1.958*	
	1.808	
	0.096	
INSTABILITAS MAKRO EKONOMI		0.434*
		1.971
		0.072
DIY	0.078*	0.100**
	2.106	2.910
	0.057	0.013
KALTENG	0.072	0.063
	1.685	1.623
	0.118	0.131
NTT	-0.064	-0.036
	-1.725	-1.029
	0.110	0.324
R²	0.528	0.546
Adj. R²	0.370	0.395
S.E.E	0.034	0.033

Note: *Signifikan di 5% *Signifikan di 10%

- Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan tahun 2005
- Ketiga angka pada tiap variabel berturut-turut adalah koefisien estimasi nilai absolut t-statistic, dan p-value
- Subs sampel ber-PDRB kecil berisi provinsi-provinsi

Tabel 5 menunjukkan bahwa pengaruh inflasi jangka panjang pada tingkat kemiskinan di kelompok provinsi dengan PDRB kecil (koefisien 5,435) lebih besar dari keseluruhan provinsi (koefisien 3,132 pada tabel 3). Pengaruh instabilitas ekonomi makro pada tingkat kemiskinan di kelompok provinsi dengan PDRB kecil (koefisien estimasi 1,507) juga lebih besar dari kelompok nasional (koefisien estimasi 1,295 pada tabel 3). Ini menunjukkan bahwa kinerja kebijakan moneter (inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro) berdampak lebih besar pada tingkat kemiskinan di kelompok provinsi dengan PDRB kecil dibandingkan secara nasional. Masyarakat dengan ekonomi kurang maju merasakan dampak inflasi dan instabilitas ekonomi makro secara lebih merugikan ketimbang masyarakat yang termasuk kelompok maju.

Beralih ke distribusi pendapatan (tabel 6), tampak pengaruh inflasi jangka panjang pada tingkat ketimpangan pendapatan di kelompok provinsi dengan PDRB kecil (koefisien 1,958) lebih besar dari kelompok nasional (koefisien 1,454 pada table 4). Pengaruh instabilitas ekonomi makro pada tingkat ketimpangan pendapatan di kelompok provinsi dengan PDRB kecil

(koefisien 0,434) juga lebih besar dan kelompok nasional (koefisien 0,194 pada tabel 4). Kedua basil ini menunjukkan kinerja kebijakan moneter (inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro) berdampak lebih besar pada tingkat ketimpangan pendapatan di kelompok provinsi dengan PDRB kecil dibandingkan di kelompok keseluruhan provinsi (sampel lengkap).

Tabel 7: Tingkat Kemiskinan dan Ekonomi Makro - Subsampel ber-PDRB > 10 Trilyun

TINGKAT KEMISKINAN & EKONOMI MAKRO		
SUB SAMPLE 2		
	MODEL 1	MODEL 2
C	-0.026	0.101
	-0.185	1.546
	0.861	0.183
INFLASI JANGKA PANJANG	1.602	
	1.321	
	0.244	
INSTABILITAS EKONOMI MAKRO		0.498
		0.903
		0.408
DKI	-0.146**	-0.112*
	-2.864	-2.487
	0.035	0.055
KALTIM	-0.054	-0.065
	-1.214	-1.134
	0.279	0.308
R ²	0.632	0.574
Adj. R ²	0.412	0.318
S.E.E	0.039	0.042

Note:

1. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan tahun 2005
2. Ketiga angka pada tiap variabel berturut-turut adalah koefisien estimasi, nilai absolut t-statistik, dan p-value.

Tabel 8: Tingkat Ketimpangan Pendapatan dan Ekonomi Makro - Subsampel ber-PDRB > 10 Trilyun

TINGKAT KETIMPANGAN PENDAPATAN & EKONOMI MAKRO		
SUB SAMPLE 2		
	MODEL 1	MODEL 2
C	0.197	0.372
	2.530	12.197
	0.045	0.000
INFLASI JANGKA PANJANG	1.103	
	1.658	
	0.148	
INSTABILITAS MAKRO EKONOMI		-0.381
		-1.592
		0.163
DKI	-0.080**	-0.054*
	-2.796	-2.196
	0.031	0.071
R ²	0.567	0.556
Adj. R ²	0.423	0.408
S.E.E	0.023	0.023

Note:

3. Variabel dependen adalah tingkat kemiskinan tahun 2005
4. Ketiga angka pada tiap variabel berturut-turut adalah koefisien estimasi, nilai absolut t-statistik, dan p-value

Tabel 7 dan 8 menampilkan hasil regresi yang menyelidiki kemungkinan pengaruh antara inflasi jangka panjang dan stabilitas ekonomi makro terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan untuk subsampel provinsi ber-PDRB tinggi. Terlihat bahwa koefisien estimasi yang diperoleh semuanya secara statistik tidak berbeda dengan nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa di kelompok provinsi dengan PDRB tinggi, kinerja kebijakan moneter (inflasi jangka panjang dan instabilitas ekonomi makro) ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan pendapatan. Hal ini merupakan penemuan penting. Tampaknya kemampuan ekonomi suatu daerah yang mapan, yang biasanya berasosiasi dengan struktur ekonomi yang lebih maju, sumber daya manusia yang lebih unggul maupun kapasitas fiskal yang tinggi, mampu membuat daerah tersebut tetap tegar (resilient) terhadap dampak negatif inflasi dan instabilitas ekonomi makro.

Analisis kedua subsampel di atas menuntun kita pada kesimpulan bahwa efek negatif inflasi rata-rata atau variasi permintaan agregat terhadap kesejahteraan golongan miskin bersifat asimetris. Efek kenaikan inflasi atau instabilitas terhadap kenaikan tingkat kemiskinan atau tingkat ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi dengan tingkat ekonomi rendah lebih tinggi dan efek sejenis semacam nasional, sementara efek tersebut tidak ditemukan secara signifikan di provinsi-provinsi dengan tingkat ekonomi tinggi.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter yang berhati-hati (prudent), yaitu kebijakan moneter yang diarahkan pada tercapainya inflasi yang rendah dan kondisi ekonomi makro yang stabil secara berkesinambungan, merupakan kebijakan yang secara relatif lebih menguntungkan provinsi-provinsi kurang maju. Selanjutnya karena tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung ditemukan di berbagai wilayah yang kurang maju tersebut, kebijakan moneter yang prudent tampaknya merupakan kebijakan moneter yang berpihak pada golongan miskin.

Penutup

Kebijakan moneter yang ekspansif dapat menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka pendek. Namun adanya fluktuasi *business cycle* dan tidak disukainya inflasi yang tinggi membuat efek positif yang dihasilkan hanya bersifat

temporer. Dalam jangka panjang, inflasi yang rendah dan stabilitas ekonomi makro yang baik berasosiasi secara signifikan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan distribusi pendapatan yang lebih baik. Kebijakan moneter yang berhati-hati

(menjaga kestabilan harga dan kondisi ekonomi makro) memiliki efek positif yang permanen dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meratakan distribusi pendapatan.

Selain itu, untuk subsampel kelompok provinsi dengan PDRB kecil dan subsampel kelompok provinsi kurang maju, hubungan jangka panjang tersebut sangat lebih kuat. Untuk subsampel dengan PDRB besar dan subsampel kelompok provinsi maju, hubungan tersebut hampir tidak terlihat. Berdasarkan sejumlah temuan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter yang berhati-hati (prudent) adalah kebijakan moneter yang berpihak pada kelompok miskin (pro-poor).

Bibliografi

- Albanesi, S, 2007, Inflation and inequality, *Journal of Monetary Economics* Vol. 54 2007
- Easterly, W, Fischer, S, 2001, Inflation and the Poor, *Journal of Money, Credit, and Banking*, Vol. 33, No. 2 (May 2001, Part 1)
- Loungani, P, Sheets, N, 1997, Central Bank Independence, Inflation, and Growth in Transition Economies, *Journal of Money, Credit, and Banking*, Vol. 29, No. 3 (Agustus 1997)
- Romer, C. D, Romer, D. H, 1999, Monetary Policy and the Well-Being of the Poor, *Economic Review*, Federal Reserve Bank of Kansas City, First Quarter 1999.